

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian atau tema penelitian yang dikaji oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya, akan dipetakan hasil penelitian terdahulu tersebut dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti/Penulis, Judul, Tahun, Penerbit | Metode Penelitian | Fokus Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian Penulis |
|----|--|--------------------------|---|--|
| 1 | <p><u>Peneliti/Penulis:</u> Yusliana dan Lena Satlita, <u>Judul:</u> Dampak Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Logending terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen</p> <p><u>Tahun:</u> 2011.</p> <p><u>Penerbit:</u> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.</p> | Deskriptif kualitatif | Dampak pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Logending terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen | Perbedaan: Penelitian ini membahas pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan peneliti membahas tentang dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang meliputi: pendidikan, pendapatan, dan kesehatan |

| No | Peneliti/Penulis, Judul, Tahun, Penerbit | Metode Penelitian | Fokus Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian Penulis |
|----|--|---|---|--|
| 2 | <p><u>Peneliti/Penulis:</u> Sri Utami</p> <p><u>Judul:</u> Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Pelabuhan perikanan Bulu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur</p> <p><u>Tahun:</u> 2015.</p> <p><u>Penerbit:</u> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.</p> | Deskriptif analisis kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan perikanan Bulu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur? • Bagaimana kontribusi pelabuhan perikanan pelabuhan Bulu bagi masyarakat di sekitar pelabuhan perikanan Bulu Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur | <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini membahas tentang aktivitas sosial ekonomi, sedangkan peneliti membahas perkembangan tempat pelelangan ikan terhadap kondisi sosial ekonomi dari pembangunan TPI</p> |
| 3 | <p><u>Peneliti/Penulis:</u> Sri Wahyuningsih</p> <p><u>Judul:</u> Dampak Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo</p> <p><u>Tahun:</u> 2018.</p> <p><u>Penerbit:</u> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo.</p> | Metode Kualitatif, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang meliputi: Pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. | <p>Peneliti di berfokuskan pada Dampak Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang meliputi: Pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan.</p> |

Sumber: Data Diolah

2. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian pada skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai sosial ekonomi. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian terdahulu adalah fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu lebih fokus aktivitas sosial ekonomi sedangkan penelitian ini fokus pada dampak pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dalam hal pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat atau yang lebih umumnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian terdahulu yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi Oleh karena itu, persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini hasil-hasil penelitian sebelumnya tentu membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang diperolehnya.

B. Kerangka Dasar Teoritik

1. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010)

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang

mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, *optimisme* dari pada *pesimisme*.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

a. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomer : 139 Tahun 1997; 9902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Tempat Pelelangan Ikan adalah disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak diadalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang atau tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh dinas perikanan, koperasi atau pemerintah daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah 1999). Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan pusat kegiatan pelabuhan-pelabuhan ikan di darat, yaitu tempat melelang ikan hasil tangkapan dan menjadi tempat pertemuan antar penjual (nelayan atau pemodal) dengan pembeli (konsumen,

pedagang atau agen pabrik pengolahan ikan). Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dirancang dengan memperhitungkan pengaruh cuaca daerah pantai. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di tempatkan sedekat mungkin dengan dermaga bongkar.

Berdasarkan Ditjen Perikanan (1994), setelah ditimbang ikan diletakkan ditempat pelelangan ikan. Juru lelang melaksanakan lelang ikan berdasarkan informasi karcis timbang sesuai urutan nomer bongkar. Kegiatan pelelangan ikan diadakan setiap hari pada jam-jam tertentu yang diatur oleh kepala pelelangan. Pelelangan ikan dapat dimulai setelah memenuhi syarat. Pelelangan ikan dilakukan dengan sistem penawaran meningkat yaitu penawaran dimulai dari harga awal yang telah ditetapkan sebelum dilakukan pelelangan sampai mencapai harga penawaran tertinggi dari calon pembeli. Apabila pada harga penawaran awal tidak ada calon pembeli, maka juru lelang menurunkan harga penawaran secara bertahap dibawah harga awal sampai ada penawaran dari calon pembeli.

b. Fungsi dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan bisa baik, maka TPI harus

dapat dikembangkan fungsinya dari *service centre* menjadi *marketing centre*. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran yang teguh dan menciptakan *growth centre* dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan. Menurut petunjuk Operasional, fungsi TPI antara lain adalah:

1. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang
2. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
3. Mempermudah pengumpulan data statistik

Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Hal ini terlihat pada hasil evaluasi Direktur Bina Prasarana perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan 1994 yang antara lain menyatakan bahwa:

1. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi daripada laju peningkatan penangkapan dan ini berarti fungsi dan peran pelabuhan sebagai sentra produksi semakin nyata.
2. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari laju frekuensi kunjungan kapal berarti usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan lebih efisien.

3. Laju peningkatan volume penyaluran es lebih tinggi dari pada volume pendaratan yang berarti meningkatnya kesadaran akan mutu ikan segar yang harus dipertahankan.

Manfaat diadakannya pelelangan ikan di TPI antara lain adalah:

1. Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen.
2. Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan.

3. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi

a. Kondisi Sosial

Menurut alwi, Hasan (2007) kondisi sosial masyarakat diartikan sebagai pengembangan masyarakat. Jadi kondisi sosial yaitu suatu keadaan yang berkaitan dengan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial. Menurut Dalyono, (2012) kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Lingkungan sosial juga mempengaruhi tercapainya pendidikan anak. Kondisi sosial yang mempengaruhi individu melalui dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengaruh secara langsung seperti, keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, organisasi dan sebagainya.

Menurut Linton (2003) dan Basrowi dan Juariyah (2010) kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari lima indikator yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, keluarga, *prestise* dan keanggotaan dalam

kelompok. Dari kelima indikator tersebut hanya indikator umur dan jenis kelamin yang mempengaruhi oleh proses pendidikan sehingga tinggal empat indikator yang perlu di ukur tingkat perbaikannya, guna mengetahui tingginya manfaat sosial bagi masyarakat.

b. Kondisi Ekonomi

Menurut Robinson (2009) bahwa kondisi ekonomi adalah suatu keadaan yang secara rasional dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini menyangkut pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hal dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Kedudukan ekonomi seseorang juga ditentukan oleh pekerjaannya, dengan pekerjaannya seseorang akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang dapat di pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut Sastropradja (2002) dalam basrowi dan Juariyah (2010), kondisi sosial ekonomi adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri keadaan sosial ekonomi adalah:

1. Lebih berpendidikan
2. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan keluarga, kesehatan, pekerjaan, pendapatan dan pengenalan terhadap lingkungan
3. Mempunyai tingkat mobilitas keatas lebih besar

4. Mempunyai ladang yang luas

5. Pekerjaan yang lebih spesifik

Menurut Zunaidi (2013) kondisi sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk melihat kondisi sosial ekonomi, menurut Melly G Tan, bahawa kedudukan sosial ekonomi mencakup 3 (tiga) faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Pendapatan diatas didukung oleh MaMahbud UI Hag dari Bank Dunia bersama dengan James Grant dari *Overseas Development Council* mengatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi dititik beratkan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan air yang sehat serta di dukung oleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya, sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupinya.

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang di atur sosial dan merupakan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembawa status. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang di tentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.

Soerjono Soekanto (2009: 208) menyatakan bahwa, Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat kedalam suatu lapisan sosial adalah sebagai berikut: (1). Ukuran kekayaan, Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya, dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan, pekerjaan orang tua, penghasilan dan seterusnya, (2). Ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan atasan, (3). Ukuran kehormatan, ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan/atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Misalnya aktivitas sosial di lingkungan masyarakat, (4). Ukuran ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh yang menghargai ilmu pengetahuan.

Pada umumnya keberadaan tempat pelelangan ikan menimbulkan dampak positif dan negatif secara langsung maupun tidak langsung. Dampak positif secara langsung, ada tenaga kerja yang tertampung, dampak negatif secara langsung keberadaan Tempat Pelelangan Ikan menimbulkan masalah sosial.

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga menimbulkan peningkatan perekonomian bagi pengelola, pemerintah, maupun warga di sekitar TPI. Perubahan tingkat perekonomian karena adanya kegiatan pembangunan, kegiatan jual beli yang memerlukan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tersedia di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Setiap masyarakat mempunyai ukuran tertentu untuk menghargai hal-hal tertentu yang ada dalam masyarakat tersebut. Masyarakat akan menghargai suatu lebih tinggi atau lebih rendah tergantung bagaimana masyarakat menilai sesuatu. Jika masyarakat lebih menghargai kekayaan material dibandingkan lainnya, orang-orang yang mempunyai kekayaan banyak akan menempati posisi atau lapisan paling atas.

Gejala ini menyebabkan munculnya pelapisan dalam masyarakat yakni perbedaan posisi seseorang atau kelompok lain secara vertikal. Jadi, pelapisan sosial terjadi karena ada sesuatu yang di hargai dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pelapisan masyarakat. Dasar ini bisa bersifat kumulatif. Artinya seseorang bisa memiliki beberapa dasar yang menyebabkan dia kedudukan dalam masyarakatnya semakin tinggi.

Dasar atau kriteria yang sering dijadikan untuk menggolongkan-golongkan anggota masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran kekayaan. Orang yang secara ekonomi memiliki banyak kekayaan akan menempati posisi tinggi.

2. Ukuran kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi tentunya akan menjadi lapisan tinggi pula.
3. Ukuran kehormatan. Orang yang paling disegani biasanya tidak memandang kekayaan atau kekuasaan atau biasa disebut juga orang yang dituakan atau akan menempati lapisan paling atas.
4. Ukuran ilmu pengetahuan. Orang dengan ilmu pengetahuan tinggi akan menempati posisi atau lapisan paling tinggi pula (Anne Ahira,2015).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat kota dengan tiga pendekatan:

- 1) pendekatan produksi yaitu menggambarkan kegiatan produksi tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup, 2) pendekatan pendapatan menekankan pada penghasilan yang telah di terima oleh setiap rumah tangga setiap bulannya, 3) pendekatan pengeluaran, menekankan besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar (saleh,2008:15).

Dengan demikian dapat disimpulkan batasan mengenai kondisi sosial ekonomi berdasarkan yang dikemukakan di atas, bahwa yang dimaksud dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah keadaan kelompok atau individu mengenai tingkat kesejahteraan yang dapat diukur melalui:

1. Tingkat pendapatan

2. Tingkat pengeluaran dan menekankan pada Pemerintahan kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, dan bahan bakar.
3. Jenis dan ragam sumber pendapatan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan cukup beragam dan kompleks, terutama dalam kualitas lingkungan permukiman dan aspek kesehatan yang dihadapi, dan hal ini jelas berkaitan pula dengan dimensi ekonomi mereka, sebab ada keterkaitan secara langsung antara kemampuan pemenuhan kebutuhan dengan upaya-upaya perbaikan kualitas hidupnya. Pada masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang sangat tidak mencukupi cenderung hidup seadanya saja, hal ini ikut pula menggambarkan pada pola-pola pemukiman mereka yang kumuh, semrawut yang justru memiliki umpan balik pada derajat kesehatan. Sebagai lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diatasi lagi, apalagi ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat.

d. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat

Aspek sosial ekonomi masyarakat merupakan ukuran langsung tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Secara aplikatif maka hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar pokoknya dikelompokkan dalam empat kelompok kebutuhan, yaitu:

1. Kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau keluarga misalnya sandang, pangan, dan papan.

2. Kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan umum dan memperbaiki kemampuan individu untuk produksi dalam memenuhi kesejahteraannya. Misalnya kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi, lembaga politik, sosial, dll.
3. Kebutuhan untuk memperbaiki demi meningkatkan kesejahteraan, seperti sumberdaya, modal, kesempatan kerja dan pendapatan.
4. Kebutuhan untuk memperoleh perasaan aman dan kebebasan untuk mengambil keputusan seperti hak asasi manusia, peran serta politik dan aturan hukum (Ira Safitri D. 2002 : 4).

Selain itu, beberapa pengertian tentang konsep dasar manusia bahwa kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi masyarakat adalah rumah, pangan dan sandang sehingga dalam kehidupan manusia tidak hanya butuh makan akan tetapi memerlukan lain yaitu rumah dan pakaian. Oleh karena itu kebutuhan dasar manusia di kelompokkan menjadi dua yaitu kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan perumahan serta kebutuhan sekunder. Kebutuhan manusia terakhir yakni kebutuhan manusia yang tidak mutlak harus dipenuhi lebih dahulu. Ini berarti bahwa setiap orang dapat saja tidak memenuhi kebutuhan sekundernya seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebersihan dan hiburan.

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa ukuran kesejahteraan suatu masyarakat dapat dikelompokkan atas indikator yang bersifat material dan bersifat non material. Kebutuhan masyarakat dalam

perkembangannya diidentifikasi atas beberapa hal pokok, yaitu kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan untuk rekreasi serta kebutuhan untuk beribadah, kebutuhan untuk belanja.

Salah satu penyebab utama terjadinya dekadensi sosial adalah terjadinya peningkatan kebutuhan, masyarakat yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan mereka, sehingga dalam kondisi tertentu menghalalkan segala cara seperti mencuri, merampok, menyerobot hak-hak orang lain yang ujung-ujungnya jelas menimbulkan masalah sosial yang dapat melibatkan banyak elemen di dalamnya.

Kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara deskriptif indikatornya sudah jelas namun indikatornya kualitatif dan kuantitatif sulit dirumuskan lebih-lebih dihubungkan di sini didasarkan atas pertimbangan nalar. Artinya, pelayanan sosial diperlakukan jika kebutuhan minimal fisik dan psikologis belum terpenuhi, dengan rincian sebagai acuan:

1. Sandang, yaitu kebutuhan untuk berpakaian
2. Pangan, yaitu kebutuhan untuk makan dan minum
3. Perumahan, yaitu kebutuhan untuk melindungi diri dan beristirahat serta berinteraksi dengan keluarga
4. Pendidikan, yaitu kebutuhan untuk membekali diri pada kecakapan, kecerdasan dan keterampilan
5. Kesehatan, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan kondisi tubuh dan fisik.

6. Psikologik, yaitu kebutuhan untuk memuaskan diri, mendapat penghargaan dan penghormatan dari lingkungan sosialnya.

4. Teori Ekonomi Pembangunan

Menurut Arsyad yang ditulis dalam buku Subandi (2012), mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.

Dalam buku Ahmad Mahyudi (2004) ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dan memperoleh cara atau metode penyelesaian dalam pembanguana ekonomi, terutama di Negara-Negara berkembang, agar pembangunan ekonomi menjadi lebih cepat dan harmonis. Dalam ilmu ekonomi, analisis dan metode pembangunan berkaitan atau menyangkut dengan aspek-aspek di luar bidang ekonomi, seperti masalah kemiskinan, 23 Subandi, Ekonomi Pembangunan (Bandung: Alfa Beta, 2012), 9 31 pengangguran, ketidakmerataan ekonomi, kependudukan dan masalah pendidikan, sosial, budaya, politik, serta lingkungan.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan

menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja.

Menurut Subandi (2012) Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (Income perkapita) dalam jangka panjang. Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki dua sifat yaitu yang pertama bersifat deskriptif analitis dan kedua bersifat pilihan kebijakan.

Adam Smith dalam teori pembangunan ekonomi membagi masa atau tahapan dalam lima tahap, yaitu:

- Tahap berburu 24 Akhmad Mahyudi, Ekonomi Pembangunan dan Analisi Data Empiris (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 1 32
- Tahap berternak
- Tahap bercocok tanam
- Tahap berdagang
- Tahap industrialisasi
- Tahap pembangunan

Adam Smith lebih menekankan faktor produksi modal dan pemilih modal (kapitalis), karena pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diperoleh dari laba atau keuntungan usaha untuk kemudian ditanamkan kembali sebagai perluasan atau tambahan produksi dan kapasitas produksi perusahaan. Sedangkan menurut teori Arthur Lewis

yang dikutip dalam buku Akhmad Mahyudi (2004) pembangunan ekonomi terbagi menjadi dua perekonomian yaitu, perekonomian industri dan perekonomian tradisional. Tahap-Tahap Pembangunan Ekonomi W.W.

ROSTOW :

- Tahap Masyarakat Tradisional
- Tahap Prasyarat Lepas Landas 25 Akhmad Mahyudi, Ekonomi Pembangunan dan Analisa Data Empiris (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Tahap Lepas Landas dan Sesudahnya.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

